

Aksi Bela Islam 212 Tahun 2016: Perspektif Teori Perilaku Kolektif

N. J. Smelser

Rizqi Kusuma Wardani

UIN Sunan Ampel Surabaya

03010221018@student.uinsby.ac.id

Abstrak: Aksi Bela Islam 212 menjadi fenomena bersejarah di dunia perpolitikan Indonesia, aksi 212 bertujuan untuk memenjarakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), aksi ini diikuti kurang lebih puluhan ribu sampai jutaan umat Islam dari seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dan fokus penelitian ialah menjelaskan bagaimana tindakan kolektif yang terjadi dalam Aksi Bela Islam 212 di Jakarta 2 Desember 2016. Penelitian ini menggunakan metode penulisan sejarah yakni heuristik, verifikasi data, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian adalah Aksi Bela Islam 212 jika ditinjau dari perilaku kolektif milik N. J. Smelser dimulai kondusivitas struktural dengan munculnya video Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya di Pulau Seribu tanggal 27 September 2016. Kemudian terjadi ketegangan struktural menimbulkan kemarahan umat Islam menganggap Ahok menistakan agama Islam. Setelahnya, menjadi pertumbuhan dan penyebaran isu dari dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Faktor mempercepat yaitu disebarkannya isu oleh tokoh – tokoh yang berpengaruh dan framing dari media untuk kasus ini. Berbekal dari serangkaian isu yang ada, kemudian terjadi mobilisasi partisipan dimulai aksi pada 14 Oktober sampai 2 Desember 2016. Setelah terjadi demo besar – besaran pada akhirnya ada kontrol sosial dengan dijatuhkannya vonis pada Ahok selama 2 tahun penjara.

Kata Kunci: *perilaku kolektif, aksi bela islam*

PENDAHULUAN

Tindakan kolektif menandakan adanya ketegangan sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat dipicu oleh seseorang mendorong untuk menyalurkan emosinya berupa gerakan protes. Dalam buku Pemetaan Teori – Teori Gerakan Sosial menyebutkan bahwa populernya teori perilaku kolektif terjadi antara tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Bentuk dari perilaku kolektif yang menjadi ciri Gerakan sosial seperti pertentangan contentious (perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan) melewati tindakan langsung, dalam artian langsung menggagang para pihak berwenang, kelompok elite dan kelompok lainnya. Perilaku kolektif sendiri memiliki beberapa karakteristik yakni tindakannya sementara, pengekspresian dari suatu permasalahan dan hanya melibatkan sekelompok masyarakat.

Dalam sejarah Indonesia mencatat bahwa perilaku kolektif sudah pernah terjadi sejak zaman kolonial, seperti pemberontakan kepada pemerintah dikarenakan sistem

ekonomi, sosial, politiknya kental akan budaya Eropa. Contoh lainnya berupa Gerakan keagamaan Kyai Aminah di Jember, gerakan mesianistik Rahman di Sukabumi, gerakan mesianistik Goesti Moehammad Heroe Tjokro (1918-1921), kerusuhan Dermodjojo di Afdeeling Berbek (1907). Banyak pula aksi atas nama keagamaan yang terjadi pada sebilan tahun terakhir seperti Aksi Bela Islam 212 pada tahun 2016.

Alasan dari terjadinya Aksi Bela Islam 212 dikarenakan Gubernur DKI yang pada saat itu menjabat yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan pidato di Pulau Seribu kurang lebih isinya, bahwa kaum Muslim telah dibohongi oleh Surat Al – Maidah ayat 51. Dalam ayat tersebut menjelaskan untuk tidak memilih pemimpin dari kalangan non-Muslim. Kemudian pidato tersebut diunggah pada platform Facebook oleh Buni Yani, dari unggahan kemudian membuat kebanyakan kaum Muslim marah dan menganggap Ahok telah menistakan agama Islam (Najib, 2018).

Aksi Bela Islam ini terjadi 3 kali atau bisa disebut Jilid I, II dan III, diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa – Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Banyak tokoh pula yang hadir seperti Amin Rais, Ma'ruf Amin, Abdullah Gymnastiar, Arifin Ilham, serta kelompok ormas – ormas lainnya. Sebenarnya aksi ini bisa dikatakan sebagai demo Front Pembela Islam (FPI) kepada Ahok, karena kebanyakan peserta aksi dari kader FPI atas komando Rizieq Shihab (ketua umum FPI) yang dibantu oleh Bachtiar Nasir dan Zaitun Rasmin (Adam, 2022).

Topik ini menarik untuk diteliti karena Aksi Bela Islam 212 sendiri sebuah Gerakan sosial keagamaan yang bukan hanya melibatkan ormas atau umat Muslim saja, akan tetapi juga berefek pada bidang pepolitan di Jakarta yang kemudian berlanjut sampai pemilu Presiden. Peran penting dalam aksi ini merupakan organisasi – organisasi sebagai unit penggerak yang berusaha menjangkau para pengikutnya untuk dikumpulkan sebanyak mungkin. Aksi ini berjalan dengan super damai meskipun dihadiri oleh berbagai macam kalangan, etnis, latar belakang yang berbeda – beda. Mereka semua memiliki tujuan dan pemikiran yang sama yaitu menyuarakan perdamaian serta keadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, menggunakan empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Heuristik merupakan kegiatan pengumpulan data dari buku, jurnal dan artikel, kemudian dikelompokkan menjadi sumber primer berupa buku *Theory of Collective Behavior* karya N. J. Smelser dan sumber sekunder berupa jurnal – jurnal dan artikel – artikel yang terkait dengan Aksi Bela Islam 212. Tahapan kedua yaitu kritik sumber, dengan melakukan verifikasi sumber – sumber yang telah dikumpulkan sebelumnya. Tahapan ketiga melakukan interpretasi yakni menafsirkan sumber yang telah diverifikasi kebenarannya. Kemudian tahapan terakhir adalah historiografi dengan menuliskan sejarah melalui penafsiran penulis.

Kajian Pustaka merupakan salah satu langkah – langkah yang digunakan untuk menjabarkan kumpulan dari penelitian terdahulu. Ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang sudah dikumpulkan oleh penulis, diantaranya yaitu Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: dari Representasi Daring ke Komunitas Luring (Pamungkas & Octaviani, 2017); Peran Media Sosial “Facebook” dalam Membentuk Solidaritas Kelompok Pada

Aksi 411 Dan 212 (Priliantini & Damayanti, 2018); Partisipasi Politik Umat Islam dalam Aksi Massa 212 dan Implikasinya terhadap Wajah Islam Indonesia (Saputra & Sutiadi, 2020); Faktor Figur dalam Mobilisasi Politik Islam: Studi pada Peran Habib Rizieq Shihab dalam Aksi Bela Islam 212 (Syukri & Herdiansah, 2023).

Pada penelitian sebelumnya belum pernah ada yang mengkaji Aksi Bela Islam 212 ditinjau dari perspektif perilaku kolektif (Collective Behavior) N. J. Smelser. Penelitian ini berfokus pada apa saja yang mempengaruhi perilaku peserta aksi dari mulai beredarnya isu sampai pada kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Riset ini diharapkan akan berguna bagi penelitian yang akan datang dan sebagai pengetahuan baru bagi pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam buku *Theory Of Collective Behavior* karya N. J. Smelser (1962) menjelaskan ada 6 tahapan terbentuknya perilaku kolektif yang terjadi secara berurutan, antara lain:

Structural conduciveness

Kondisi dimana terjadi ledakan kepanikan dari peraturan instansi yang ada, akan tetapi tidak sampai mengganggu pada kebanyakan orang. Kondisi ini merupakan faktor alamiah dan diluar jangkauan manusia (Smelser, 1962). Dalam hal ini, adanya bibit – bibit untuk membuka peluang terjadinya aksi ataupun dapat menjadi dasar terjadinya perilaku kolektif (Wahyudi, 2009).

Jika dikaitkan dengan peristiwa Aksi Bela Islam 212, beberapa hal yang menjadi dasar dari peristiwa ini yaitu, beredarnya video pidato dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seorang Gubernur DKI Jakarta saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, yang kurang lebih dalam pidatonya berisi “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu engga bisa pilih saya, ya kan dibohongin pake surat Al – Maidah 51 macem – macem itu, itu hak bapak ibu. Jadi kalo bapak ibu merasa ngga bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya gapapa, karena ini panggilan pribadi bapak ibu” (VIVA.CO.ID, 2016). Kemudian pidato tersebut menyebar melalui postingan Facebook milik Buni Yani pada 6 Oktober 2016.

Dasar lain terjadinya Aksi Bela Islam 212 yaitu muncul pernyataan mengatasnamakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa – Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang menyatakan dua hal. Pertama, Ahok telah menghina para Ulama dengan kalimat orang yang suka berbohong. Kedua, menganggap Ahok telah menistakan agama Islam melalui Al – Qur’an Surat Al – Maidah ayat 51, bahwa ayat tersebut dianggap salah (Saputra & Sutiadi, 2020).

Jauh sebelum terjadinya aksi, telah banyak beredar sentimen negatif tentang pencalonan Ahok dalam pemilu Gubernur DKI Jakarta. Alasan ketidaksukaan beberapa umat Islam dikarenakan Ahok beragama non-Muslim dan dari etnis Tionghoa (Syukri & Herdiansah, 2023). Juga Ahok banyak memberikan pernyataan – pernyataan yang kontroversial seperti larangan menyembelih hewan di pinggir jalan dan di sekolah -

sekolah, kemudian daging yang akan dibagikan harus melalui uji lab dahulu. Adanya pembatasan lokasi untuk unjuk rasa atau demo, tempat yang diperbolehkan hanya di Alun – Alun Demokrasi DPR/MPR RI, Silang Selatan Monumen Nasional (Monas) dan di Parkir Timur Senayan (Nesti & Afrianti, 2023).

Penyebab dari Aksi Bela Islam 212 telah lama berhembus saat Ahok baru menyalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat menjadi Gubernur Ia membuat dan mengesahkan peraturan yang membuat sebagian orang Jakarta resah terhadapnya, seperti unjuk rasa hanya diperbolehkan di 3 tempat dan tidak boleh menyembelih hewan di sembarang tempat. Dimasa akhir jabatannya Ahok berpidato yang isinya menistakan agama Islam.

Structural strain

Dari kondisi sebelumnya meningkat menjadi ketegangan struktural dengan mengancam asset yang dimilikinya. Ketakutan akan terjadi perampasan hak, adanya permusuhan, kerusakan, serta gerakan revolusi menimbulkan perilaku kolektif lebih besar (Smelser, 1962). Dalam peristiwa Aksi Bela Islam 212 terjadi ketegangan antara Ahok dengan kelompok – kelompok Islam baik di Jakarta maupun luar Jakarta. Tokoh – tokoh yang marah akan pernyataan Ahok diantaranya Rizieq Shihab, AA Gym, Bachtiar Nasir, Arifin Ilham dan Ulama lainnya.

Pada tahapan ini terjadi ketegangan antara penuntut dan yang dituntut, sebagian besar kemarah dilakukan oleh kelompok Rizieq Shihab yaitu Fornt Pembela Islam (FPI). Mereka mengajak orang – orang untuk mengawal kasus penistaan agama ini, jadi semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam ketegangan (Adam, 2022).

Faktor sosiologis juga menjadi salah satu pengaruh ketegangan atau terancamnya komunitas Islam. Isu – isu yang beredar tentang Islam seperti kebijakan pemerintah yang dianggap membatasi kebebasan dalam beragama, kasus hukum tentang penistaan agama, serta perubahan regulasi yang merugikan orang Islam (Apriani et al., 2024).

Growth and spread of a generalized belief

Berkembangnya kepercayaan umum disebabkan oleh ketegangan struktural, kepercayaan umum ini diyakini oleh masyarakat luas dan menjadi pengetahuan umum yang dipercayai keabsahannya (Smelser, 1962). Kelompok – kelompok yang mengalami ketidakadilan ini akan mencari orang dari kalangan luar, orang tersebut harus bertanggung jawab atas suatu ketegangan yang sedang berlangsung.

Kebenaran bahwa Ahok telah melakukan penistaan diperkuat dengan munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), kurang lebih menyatakan bahwa orang yang menganggap bohong Surat Al – Maidah ayat 51 itu sama saja dengan penodaan terhadap Al – Qur'an dan penghinaan terhadap Ulama serta Umat Islam. MUI meminta aparat hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan agama Islam (Kami, 2016).

Orang Islam yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi semakin yakin dengan keluarnya fatwa MUI. Pengambilan sikap yang dilakukan MUI ini

akan menjadikan perilaku kolektif bisa saja akan cepat – cepat dilakukan oleh mereka yang marah akan pernyataan Ahok. Kedudukan MUI dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia ini sangat penting, MUI dijadikan sebagai pedoman oleh mereka untuk menjalankan kehidupan sehari – hari.

Precipitating factors

Jika kondisi sebelumnya belum melakukan tindakan kolektif yang berarti, pada tahap ini terjadi faktor pemercepat atau adanya ledakan aksi nyata dari salah satu kelompok penginisai (Smelser, 1962). Kelompok tersebut yang memantik emosi publik, perilaku ini seakan – akan tidak berhubungan secara langsung dengan alasan dari perilaku kolektif, akan tetapi dapat melemahkan sistem sosial.

Kepercayaan umum yang disebarkan oleh para tokoh yang berpengaruh dalam Aksi Bela Islam 212 yaitu melalui sosial media. Seperti di Facebook, Umat Islam membentuk media untuk menyusun strategi, menyampaikan pendapat dan saling tukar pikiran antar anggota, grup tersebut bernama “Jamaah Facebookiyyah”. Media sosial menjadi faktor pemercepat Aksi Bela Islam 212 melalui Facebook, Instagram, Twitter (sekarang bernama X), dan Whatsapp (Priliantini & Damayanti, 2018).

Faktor pemercepat lainnya yakni dari adanya framing pemberitaan dari kasus penistaan agama ini. Framing yang disebarkan ke media sosial mengajak Umat Islam untuk membela Al – Quran, Ulama, dan menyakini bahwa di bawah kepemimpinan non-Muslim akhlak baik tidak dijalankan. Mereka juga menyuarakan pemimpin itu harus dari orang Islam karena mayoritas agama di Indonesia itu Islam (Liberti et al., 2018).

Jadi sosial media sangat berperan penting menjadi faktor pemercepat dari dilakukannya Aksi Bela Islam 212. Penyebaran berita dari mulai media sosial luas seperti Facebook, Instagram dan Twitter kemudian merambah ke Whatsapp untuk menjaga keprivasian informasi dengan membuat grup Whatsapp.

Mobilization of participants for action

Pada tahap ini peserta aksi melakukan tindakan kolektif secara nyata, sudah dimulainya permusuhan, perpecahan dan kepanikan. Mereka mengharapkan dilakukannya reformasi dari para petinggi pemerintahan atau pembuat peraturan (Smelser, 1962). Perilaku kolektif dimobilisasi oleh seorang pemimpin untuk membakar semangat dengan menyuarakan slogan, nyanyian, yel – yel, dan lainnya.

Aksi Bela Islam terjadi sebanyak tiga kali, aksi pertama terjadi pada 14 Oktober 2016, diawali dengan sholat Jum’at di Masjid Istiqlal kemudian jalan kaki ke depan Kantor Bareskrim di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan dan di kantor Balai Kota DKI Jakarta (Kumparan, 2017). Mereka menuntut untuk segera dilakukannya pemeriksaan kasus penistaan agama oleh Ahok. Pimpinan mereka yakni Rizieq Shihab bahkan mengancam jika tidak ada respon dalam 3 minggu kedepan, Ia dan anggotanya akan melakukan aksi yang lebih besar lagi (Stekom, n.d.).

Kemudian aksi kedua terjadi pada 4 November 2016, titik kumpul berada di Masjid Istiqlal. Aksi ini dimobilisasi oleh Rizieq Shihab sebagai pembina, Bachtiar Nasir

sebagai ketua, waknya Misbahul Anam, pengarahan barisan serta pemberi pesan atau orasi dipadu oleh Muhammad Zaitun Rasmin. Aksi dimulai dengan melaksanakan sholat juma'at di Masjid Istiqlal, setelah itu peserta diarahkan untuk jalan kaki ke Istana Negara. Karena pada tuntutan kali ini, target mereka tertuju ke Presiden Joko Widodo untuk menanggapi kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok (Asadi, 2018).

Aksi ketiga terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016 di Monumen Nasional (Monas), peserta aksi turun lagi ke jalan dikarenakan lambatnya proses hukum dan mereka menginginkan untuk dipercepat vonis hukuman terhadap Ahok. Jumlah massa sebanyak yaitu 7 juta orang, akan tetapi perhitungan tersebut belum pasti. Ada juga yang mengatakan hanya sekitar 500 – 700 ribu orang (Afrimadona et al., 2020). Aksi berjalan super damai, kegiatan inti ialah sholat Jum'at. Hadir pula Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, TNI Jenderal Gatot Nurmantyo serta pejabat lainnya (CNN Indonesia, 2019).

Mobilisasi masa dalam Aksi Bela Islam 212 dilakukan oleh Rizieq Shihab yang dibantu oleh anggota – anggota lainnya, baik dalam aksi pertama sampai aksi ketiga. Tuntutan yang diajukan kepada pemerintahan ialah ingin Ahok cepat – cepat untuk dipenjara dan harus menegakkan hukum seadil – adilnya.

The operation of social control

Adanya kontrol sosial dari pemerintah seperti polisi, pengadilan, otoritas agama, pemimpin masyarakat, dll. untuk mencegah meluasnya tindakan kolektif. Terdapat dua jenis kontrol sosial, pertama, meminimalisir ketegangan sebelum terjadinya episode – episode tindakan kolektif, karena tindakan kolektif ini dapat menyerang mental masyarakat luas. Kedua, kontrol sosial yang dilakukan oleh unsur – unsur dalam pemerintahan, karena pada tahap ini sudah terjadi tindakan kolektif berupa aksi nyata, yang orang – orang sipil tidak dapat mencegahnya (Smelser, 1962).

Kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah ini lebih mementingkan pengurangan dampak buruk pada saat aksi. Aparat dan pemerintah menyakinkan para peserta aksi bahwa mereka tidak menghalang – halangi kasus yang sedang berlangsung dan mereka menyerahkan semua pada penegak hukum agar diadili seadil – adilnya. Pemerintah tidak melawan atau menghalangi aksi, hal itu dibuktikan dengan pernyataan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad bahwa akan serius dan berkomitmen menangani kasus ini (Wijayanto & Purworini, 2018).

Meminimalisir terjadinya ricuh saat Aksi Bela Islam 212 bahkan sudah dilakukan sebelum tanggal 2 Desember 2016. Dalam video dari akun Youtube TVOneNews yang diunggah pada 28 November 2016, pemerintah diwakilkan oleh Kapolri, menyampaikan bahwa mereka akan menangani ketertiban jalannya aksi dengan menjaga keamanan, mengakomodir panggung, arah kiblat, tempat wudhu, toilet dan arus keluar masuk. Pada kesempatan yang sama pula tugas penyidikan dari kepolisian sudah selesai tinggal berkas – berkas diserahkan kepada kejaksaan.

Puncak dari Aksi Bela Islam 212 ini teletak pada dijatuhkannya hukuman pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama 2 tahun. Majelis hakim menyatakan bahwa Ahok

terbukti melakukan pidana sesuai yang tertera dalam Pasal 156a KUHP, yaitu secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama (Atriana, 2017).

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah yaitu meminimalisir adanya kericuhan, kekerasan atau tindak kejahatan lainnya. Mereka menerima dengan tangan terbuka apa saja keluhan kesah yang disampaikan oleh peserta aksi, bahkan sampai menyediakan tempat dan mengatur tata tertib selama berjalannya Aksi Bela Islam 212.

KESIMPULAN

Aksi Bela Islam 212 jika ditinjau dari perspektif teori perilaku kolektif (Collective Behavior) milik N. J. Smelser, diputuskan menjadi enam bagian mengapa tindakan kolektif itu bisa terjadi sampai pada kontrol sosial yang dilakukan oleh para petinggi yang disini merujuk pada pemerintah Indonesia. Sebenarnya ketidaksukaan kepada kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ada sebelum dilantiknya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebagian Umat Islam menganggap bahwa peraturan yang dibuat oleh Ahok merugikan Umat Islam Jakarta.

Kesempatan untuk menjatuhkan Ahok ada pada pernyataannya tentang Surat Al – Maidah ayat 51 sebagai surat bohong. Mulai saat inilah Ahok di demo dari penjuror daerah berbondong – bondong datang ke Jakarta. Aksi Bela Islam 212 terjadi sebanyak tiga kali yaitu pada 14 Oktober, 4 November dan 2 Desember 2016. Sampai pada putusan penjara untuk Ahok sebanyak 2 tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Y. F. (2022). Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia. *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 6(2).
- Afrimadona, Rosojati, H., Budiman, H., Adriansyah, J., Afifah, N. F., Evita, N., & Imawan, R. P. (2020). *Sudah Senja di Jakarta: Ideologi, Kebijakan Publik, Politik, dan Ruang Ibu Kota*. Yayasan Puastaka Obor Indonesia dan Populi Center.
- Apriani, A. P., Musyanova, S. A., & Zaneta, S. (2024). Sosial Movement Berbasis Religiusitas: Studi Kasus Gerakan Aksi Bela Islam 212. *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.78>
- Asadi, Moh. F. (2018). Strategi Framing HTI, FPI dalam Aksi Damai 411: Perspektif Gerakan Sosial. UIN Syarif Hidayatullah.
- Atriana, R. (2017). Ahok Divonis 2 Tahun Penjara. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3496185/ahok-divonis-2-tahun-penjara>
- CNN Indonesia. (2019). Ahok sang Pemicu Rentetan Aksi Bela Islam dan Nama Besar 212. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190115135955-32-360979/ahok-sang-pemicu-rentetan-aksi-bela-islam-dan-nama-besar-212>
- Kami, I. M. (n.d.). MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, ini Isinya. detiknews. Retrieved September 18, 2024, from

<https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya>

- Liberti, L., Fitriani, E., & Putra, E. V. (2018). Keterlibatan Mahasiswa Dalam Aksi Bela Islam 212 di Jakarta. *Jurnal Perspektif*, 1(4).
- Najib, Muh. A. (2018). Sublimasi Politik dalam Aksi Bela Islam 212. *Resolusi*, 1(2).
- Nesti, M. R., & Afrianti, D. (2023). Bahasa Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang Menjadi Kontroversi (Kajian Linguistik Forensik). *SIBERNETIK: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1(1).
- Priliantini, A., & Damayanti. (2018). Peran Media Sosial “Facebook” dalam Membentuk Solidaritas Kelompok Pada Aksi 411 Dan 212. *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 7(1).
- Rangkuman Aksi Massa Islam, dari 1410 Hingga 112. (n.d.). kumparan. Retrieved September 19, 2024, from <https://kumparan.com/kumparannews/rangkuman-aksi-massa-islam-dari-1410-hingga-112-879590969>
- Saputra, A. T. D., & Sutiadi, D. (2020). Partisipasi Politik Umat Islam dalam Aksi Massa 212 dan Implikasinya terhadap Wajah Islam Indonesia. *ILMU USHULUDDIN*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.15408/iu.v7i2.15424>
- Smelser, N. J. (1962). *Theory Of Collective Behavior*. New York: The Free Press.
- Stekom. (n.d.). Aksi Bela Islam. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Aksi_Bela_Islam
- Syukri, M. K., & Herdiansah, A. G. (2023). Faktor Figur dalam Mobilisasi Politik Islam: Studi pada Peran Habib Rizieq Shihab dalam Aksi Bela Islam 212. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9525>
- Wijayanto, T. D., & Purworini, D. (2018). Respon Pemerintah pada Aksi Damai 411 dan 212: Analisis Isi Harian Kompas Edisi November 2016—Desember 2016. *Komuniti*, 10(1).